

MAKALAH



**RELOKASI IBU KOTA NEGARA DAN DAMPAK
EKONOMI POLITIK PADA DAERAH KHUSUS IBU
KOTA JAKARTA**

**DISAMPAIKAN PADA ACARA DISKUSI SANTAI BERSAMA
ADVOKASI HUKUM HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU
POLITIK (HIMAJIP) KORWIL III HIMAJIP UNIVERSITAS NASIONAL
PADA TANGGAL 17 MEI 2022**

**Dr. Asran Jalal, Drs, M.Si
NIDN: 0328106101**

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
TAHUN 2022**

Abstrak

Relokasi ibu kota negara dari Daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur dimulai tahun 2022. Pertimbangan pemerintah merelokasi ibu kota negara antara lain adalah kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara sudah tidak memadai, akibat tingginya aktifitas bidang pemerintahan dan ekonomi dan potensi bencana alam yang mungkin terjadi, berupa banjir dan gempa bumi. Pertimbangan pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur antara lain adalah budaya masyarakat Dayak sebagai penduduk asli, toleran terhadap masyarakat Indonesia lainnya yang menetap di wilayah tersebut.

Pertanyaannya adalah apa pertimbangan politik merelokasi ibu kota negara? Apa dampak ekonomi politik relokasi ibu kota negara pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta? Argumen tulisan adalah relokasi ibu kota negara tidak memiliki dampak yang signifikan aspek ekonomi politik pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, mengingat ibu kota negara di Kalimantan Timur mengembangkan model ibu kota negara terbatas pada aktifitas pemerintahan dan relokasi dilakukan secara bertahap. Dampak politik, memaksa Daerah khusus Ibu Kota Jakarta menyesuaikan dengan struktur politik pemerintahan yang berlaku pada provinsi lainnya di Indonesia.

Kata kunci: relokasi ibu kota negara, daerah khusus ibu kota Jakarta, Kalimantan Timur

Abstract

The relocation of the national capital from the Special Capital Region of Jakarta to East Kalimantan will begin in 2022. The government's considerations in relocating the national capital include, among others, that Jakarta's position as the nation's capital is inadequate, due to high levels of government and economic activities and the potential for natural disasters that may occur, in the form of floods and earthquakes. The government's considerations in relocating the nation's capital to East Kalimantan, among others, are the culture of the Dayak people as indigenous people, tolerant of other Indonesian people who live in the area.

The question is what are the political considerations in relocating the country's capital city? What is the political economic impact of relocating the nation's capital city to the Special Capital Region of Jakarta? The written argument is that the economic aspect does not have a significant impact on the Special Capital Region of Jakarta, considering that the state capital in East Kalimantan is developing the model for the state capital in stages. Political impact, forcing the Special Capital Region of Jakarta to adapt to the political structure of government that applies to other provinces in Indonesia.

Keywords: relocation of the national capital, special area for the capital city of Jakarta, East Kalimantan

A. Latar Belakang Masalah

Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) pada Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi secara khusus meminta izin dan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan IKN ke Pulau Kaltim.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Wilaya Kaltim sudah memiliki ketetapan hukum tetap, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara Tahun 2022 (UU No. 3/2022) pada tanggal 15 Februari 2022. Proses pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap, proses pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022.

Relokasi IKN dilandasi beberapa pertimbangan aspek hukum dan aspek lingkungan Jakarta. Aspek hukum, Undang-Undang yang ada pada saat ini tidak lagi memadai untuk melakukan penataan Jakarta yang padat penduduk, tingkatan kemacetan dan faktor bencana alam seperti banjir setiap tahunnya. Jakarta juga mengandung potensi mengalami dampak gempa bumi besar. Pemerintah juga memiliki beberapa pertimbangan memilih wilayah Kaltim sebagai lokasi IKN baru. Pertimbangan dimaksud antara lain adalah masyarakat Kaltim yang dihuni mayoritas suku Daya, juga dihuni berbagai suku besar di Indonesia seperti suku Jawa, suku Bugis, dan Madura. Interaksi antara suku Dayak sebagai suku asli Kaltim sejalan dengan konsep nasionalisme saling menghormati. (Kementrian BPPN/Bapennas,2021).

Pertanyaannya adalah Apa pertimbangan politik merelokasi ibu kota negara di ? Apa dampak ekonomi politik relokasi ibu kota negara pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta? Artikel ini bertujuan ikut berkontribusi seputar isu pemindahan IKN tersebut secara khusus mendiskusikan dampak relokasi IKN kemungkinan dampak ekonomi politik pada DKI. Pembahasan terdiri dari beberapa tema, pertama konsep ibu kota dan model ibu kota. Bahagian ini fokus pada konsep dan teori tentang IKN sebagai landasan menganalisis isu relokasi IKN. Kedua, pertimbangan relokasi dari

Jakarta, pertimbangan relokasi ke Kaltim. Bahagian ini melacak pertimbangan pemerintah merelokasi IKN dan pertimbangan memilih Kaltim sebagai lokasi. Ketiga, Relokasi IKN ke Kaltim dan implikasi ekonomi politik pada DKI Jakarta. Bahagian ini menganalisis dampak ekonomi dan politik pada DKI Jakarta sebagai konsekuensi relokasi IKN ke Kaltim. Keempat, kesimpulan dan implikasi yakni implikasi kebijakan dan implikasi akademik.

Argumen tulisan adalah relokasi ibu kota negara tidak memiliki dampak yang signifikan aspek ekonomi politik pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, mengingat ibu kota negara di Kalimantan Timur mengembangkan model ibu kota negara terbatas pada aktifitas pemerintahan dan relokasi dilakukan secara bertahap. Dampak politik, memaksa Daerah khusus Ibu Kota Jakarta menyesuaikan dengan struktur politik pemerintahan yang berlaku pada provinsi lainnya di Indonesia.

Metode artikel ini bersifat kualitatif. Data-data dan informasi bersumber data sekunder berupa UU No.3/2020, Dokumen Kementrian BPPN/Bapennas, dan berbagai ungkapan pengamat dan politisi melalui media internet. Analisis data penelitian ini adalah konten analisis (*content analysis*) berupa kata-kata/kalimat inti, frasa kunci dari sumber tertulis (Jensic, Alicia, 2011). Sumber tertulis dimaksud dalam penelitian ini adalah pernyataan yang disampaikan ilmuwan dan politisi yang dipublikasikan di melalui media website.

B. Konsep Ibu Kota

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan IKN sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan ibu kota dalam suatu negara biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. *Bartolini* (2005) mengatakan, ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang

membentuk suatu negara/bangsa. IKN merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.

IKN pada dasarnya merupakan lokasi kedudukan pemerintahan pusat beraktifitas menjalankan pemerintahan suatu negara meliputi DPR, Presiden dan kementerian dan Lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Pertimbangan Pembangunan IKN baru terdapat berbagai pandangan. *Rossmann* (2017) menjelaskan berbagai pertimbangan tentang hal tersebut. Pertama konsep 'nation states' bertalian dengan nasionalisme. Pemindahan IKN di 40 negara yang menggambarkan masih kuatnya keterkaitan antara negara dan rasa nasionalisme. Bagi negara-negara maju, khususnya di Barat, keberadaan IKN lebih dipandang sebagai kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara. Negara-negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, keberadaan IKN dianggap sebagai penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara.

Kedua, pertimbangan lokasi dalam pemilihan suatu ibu kota secara tidak langsung mencerminkan pola pikir para pengelola (atau pendiri) negara. (Kementrian BPPN/Bapennas, 2021). Spanyol memiliki Madrid yang terletak di tengah negara, dimana pertimbangannya antara lain untuk kemudahan kontrol wilayah negaranya. Nigeria membangun ibu kota baru pada tahun 1991 di Abuja yang berada di tengah negara ini untuk menggantikan Lagos yang berada di garis pantai ujung Barat Daya, dengan alasan untuk menekankan persatuan negara yang memiliki keragaman etnis dan agama tersebut. Brazil juga memindahkan ibu kotanya dari kawasan pantai di Rio de Janeiro ke bagian tengah benua Amerika pada tahun 1961, menjadi Ibu kota baru yang disebut Brasilia, dibangun dengan tema "membawa kemajuan ke Kawasan pedalaman Brazil". (Mumford, L., 1991) (Ibino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M., 2015).

Pandangan lainnya yang mendasari pemilihan suatu ibu kota negara yakni atas dasar pertimbangan kompromi politik. Amerika Serikat menetapkan Washington DC sebagai ibu kotanya pada tahun 1790 sesuai dengan hasil kompromi politik. Perbedaan pandangan mengenai lokasi yang tepat antara negara-negara bagian di

Utara dengan negara-negara bagian di Selatan pada akhirnya diselesaikan oleh George Washington yang memilih lokasi di sekitar perbatasan negara- negara bagian yang terletak di tepi Sungai Potomac sebagaimana dikenal sekarang (Kementrian BPPN/Bapennas,2021).

Quistorff, B (2015) analisisnya tentang implikasi relokasi ibu kota baru menyatakan, bahwa IKN lama tidak akan terdampak secara negatif dari aspek ekonomi apabila perpindahan ibu kota dilakukan secara bertahap. Relokasi beberapa negara di dunia membawa dampak positif pada IKN lama. Perubahan ibu kota negara Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia Studi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ibu kota memiliki dampak positif yang signifikan terhadap aspek-aspek ekonomi ibu kota baru seperti jumlah pekerjaan dan pendapatan. Di sisi lain, ibu kota sebelumnya tidak mengalami pengurangan signifikan dari segi pendapatan dan jumlah pekerjaan. Pemindahan ibu negara Nigeria, yang memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja. tidak banyak mempengaruhi IKN lama. Di kasus Nigeria, relokasi pegawai pemerintah dari Lagos tidak mempengaruhi aspek ekonomi Lagos dan Lagos tetap mempertahankan statusnya sebagai pusat komersial Nigeria.

C. Pertimbangan Relokasi Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur

Pertimbang yang mendasari pemerintahan memindahkan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kaltim adalah pemerataan ekonomi dan populasi. Sebagaimana dikemukakan Presiden Jokowi:

“... 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat berbondong-bondong ingin tinggal di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena daya tarik ekonominya yang tinggi. Harapannya, memindahkan ibu kota negara ke Kaltim dapat menjadi magnet baru ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja. Bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa, Selain itu, pemindahan ibu kota negara didasari dari tidak meratanya populasi penduduk Indonesia, 56 persen atau 156 juta penduduk RI terkutat di Pulau Jawa. Oleh karenanya, supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan populasi, ingin pembangunan ibu kota baru segera dieksekusi bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia...” (nasional.kompas.com)

Menurut Kementerian Badan perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN/Bappenas) pertimbangan relokasi IKN berkaitan faktor lingkungan dan faktor konstitusi. Faktor lingkungan adalah DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.

Faktor konstitusi, Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai IKN, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Penyesuaian itu bermakna bahwa pengaturan tentang tata kelola Ibu Kota Negara bergantung dengan kondisi Jakarta. Implikasinya adalah kekosongan hukum atas sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang tata kelola IKN, dari hulu ke hilir, yang disusun tanpa penyesuaian terhadap kondisi-kondisi tertentu, sehingga pengaturan yang dibuat menjadi lebih ideal. (Kementrian BPPN/Bapennas,2021).

Pertimbangan relokasi IKN sebagaimana dikemukakan Presiden Jokowi dan Kementrian BPPN/Bapennas terdapat dua faktor yaitu faktor ekonomi, faktor populasi, faktor lingkungan dan faktor konstitusi. Faktor ekonomi agar perputaran uang bukan hanya di DKI Jakarta ketimpangan populasi, penduduk terkonsentrasi di DKI Jakarta. Faktor lingkungan, potensi DKI Jakarta rawan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Faktor kekosongan hukum UU, membatasi pembangunan DKI Jakarta sebagai IKN.

Apa aspek politik pertimbangan pemerintah merelokasi IKN? Menurut Presiden Jokowi, IKN merupakan simbol identitas dan representasi kemajuan bangsa. Pemindahan IKN baru dirancang sebagai simbol identitas, representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, *smart, and green city*, dan pembangunannya dilakukan secara bertahap. (nasional.kompas.com). Model kota

seperti ini memiliki ciri terencana dan terukur setiap tahapan pembangunannya. (Rossman, V., 2017).

Menurut Kementrian BPPN/Bapennas, IKN menjadi pusat pemerintahan yang ideal, dicirikan dengan adanya simplifikasi proses birokrasi, efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga kualitas pelayanan publik dapat lebih meningkat. Pelayanan dan pengelolaan kota sebagai pusat pengelolaan IKN harus dapat mencerminkan pelayanan berkelas internasional yang efisien dan berorientasi *smart governance*. (Kementrian BPPN/Bapennas,2021). Model ini merupakan ciri manajemen public baru (*new public management*). (Benington, J. and Hartley, J. 2001).

Format IKN sebagai suatu pemerintahan yang khusus. Pemerintahan IKN dilaksanakan oleh sebuah otorita yang merupakan bagian dari pemerintah pusat (setara Kementerian/Lembaga). Konsekuensinya adalah tidak adanya lembaga perwakilan di IKN. Filosofi bekerja pemerintahan IKN adalah filosofi bekerjanya *city manager*, di mana tugas dan fungsinya hanya mengelola kota dengan baik, tanpa campur tangan politik. Walaupun demikian, pada dasarnya pemilihan umum tetap ada di wilayah, tetapi terbatas hanya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.. Pemerintahan Khusus IKN ini pada dasarnya adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mengelola sebuah wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada dasarnya tidak diperlukan adanya lembaga perwakilan di daerah (DPRD) karena sudah ada lembaga perwakilan yang mengawasi, yaitu DPR (pusat). Artinya, pemilu untuk memilih anggota DPRD tidak perlu diadakan. (Kementrian BPPN/Bapennas,2021)

UU No. 3/2022, tertulis pada Pasal 1 poin (1), Pasal 1 (2), Pasal 8 ayat (4), pasal ayat (1), pasal 9 ayat (1 dan 2), pasal 10 ayat (1 dan 2). Pasal-pasal dimaksud berkaitan dengan nama, penyelenggara ibu kota negara dan proses pengangkatan, pemberhentian penyelenggara ibu kota negara, dan kedudukan penyelenggara ibu kota negara.

Pasal 1 poin 2 menyatakan” Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”.Pasal 8 ayat (4) menyatakan “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.

Pasal 9 (1) menyatakan “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.” Ayat (2) menyatakan “Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.”

Pasal 10 (1) menyatakan “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.” Ayat (2) menyatakan “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir”.

Penjelasan UU No.3/2020 pada pasal tersebut di atas, memperlihatkan perbedaan kedudukan dan proses pengisian penyelenggara pemerintahan DKI dan Ibu Kota Nusantara.

Varibel	DKI Jakarta	Ibu Kota Nusantara
Nama jabatan/kedudukan	Gubernur/ setingkat Gubernur	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/ setingkat Menteri
Struktur pemerintahan	Gubernur dan DPRD	Kepala Otorita
Proses Pengisian dan	Pemilihan Umum masa lima	Diangkat Presiden persetujuan DPR dan diberhentikan

Pemberhentian	tahun	Presiden
---------------	-------	----------

Faktor politis terlihat relokasi IKN untuk menghindari disharmonisasi antara presiden dengan gubernur akibat struktur pemerintahan dan sistem pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pertimbangan ini terlihat format format struktur pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam naskah akademik Kementerian BPPN/Bapennas dan UU No.3/2020. Format Ibu Kota Nusantara adalah struktur pemerintahan tanpa DPRD dan Kepala Otorita Nusantara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Struktur pemerintahan Gubernur DKI Jakarta selama ini terdiri dari gubernur dan DPRD. Proses pengisian jabatan gubernur dan DPRD melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu). Implikasi struktur pemerintahan DKI Jakarta yang demikian adalah dapat menimbulkan disharmonisasi relasi gubernur terpilih dengan presiden. Kondisi terjadi apabila asal partai politik pengusung gubernur berbeda dengan partai pengusung presiden. Kondisi ini yang terlihat dipermukaan selama ini, disharmonisasi relasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi.

Pertimbangan memilih Kaltim sebagai relokasi dilandasi faktor budaya dan faktor ekonomi, dan politik. Faktor budaya. Faktor ekonomi, kehidupan ekonomi warga Kaltim beragam, mulai dari industri kecil dan menengah, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan jasa. Perkembangan industri perkebunan dan pertambangan telah mengubah pola perekonomian masyarakat yang beradaptasi sesuai perkembangan kondisi yang ada. Salah satu persoalan utama yang dihadapi hingga saat ini adalah konflik kehutanan dan wilayah adat Suku Dayak. Bagi masyarakat suku Dayak, hutan adalah air sumber penghidupan dan dianggap sebagai jantung Kalimantan sehingga perlu dilestarikan. Karena keterikatan yang sangat erat ini, masyarakat adat Dayak ingin menjaga dan mengamankan hutan, namun dalam perkembangannya mereka termarginalkan. Kehadiran transmigran misalnya, merambah wilayah tanah adat masyarakat Dayak. Desa-desanya transmigrasi kemudian dimekarkan menjadi desa definitif dan mendapatkan program sertifikasi tanah, sarana prasarana dasar, dan Dana Desa. Sementara desa masyarakat adat Dayak yang sering kali terpencil di tengah hutan konservasi tidak mendapatkannya. Pada periode

1970an terdapat program *resettlement* yang memindahkan masyarakat Dayak dari kampung asal leluhurnya, dan kemudian diberikan status hutan Negara. Dengan status ini, dilaksanakan berbagai peruntukan seperti Kawasan konservasi, Hutan Tanaman Industri, atau pertambangan. Kondisi ini menutup akses masyarakat Dayak terhadap tanah leluhurnya, dan jika mereka mencari penghidupan di hutan dianggap sebagai perambah hutan. Masyarakat Dayak saat ini bekerja di berbagai sektor, mulai dari peladang, bekerja diperkebunan atau pertambangan, hingga menjadi pegawai negeri. (Kementrian BPPN/Bapennas,2021). Menurut Presiden Jokowi relokasi IKN dilandasi agar terjadi keadilan ekonomi. Selama ini perputaran uang hanya terpusat di DKI Jakarta, diharapkan kemudian terjadi pemerataan pemerataan aktifitas bidang ekonomi antara pulau Jawa dan luar Jawa.

Faktor budaya, Kaltim terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Suku Bugis, Banjar, dan berbagai etnis lainnya seperti Suku Jawa, Madura, yang banyak diantaranya telah berakulturasi melalui kawin campur lintas suku, termasuk dengan suku bangsa asli seperti Suku Paser, Kutai, dan berbagai kelompok Dayak lainnya. Karakter dan adat istiadat Suku Dayak pada dasarnya sangat terbuka, karena menganut trilogi peradaban, yaitu: hormat kepada leluhur, patuh kepada orangtua,serta berdamai dan serasi dengan negara. Keterbukaan masyarakat asli, keberagaman sosial budaya yang telah terjalin sejak lama, dan terbentuknya masyarakat yang heterogen menjadi nilai tambah bagi kepindahan IKN ke Kaltim. (Kementrian BPPN/Bapennas,2021).

Faktor budaya, IKN Indonesia yang baru di Kaltim dengan pertimbangan mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai melalui Bhinneka Tunggal Ika (Kementrian BPPN/Bapennas,2021).

Penjelasan tersebut memperlihatkan alasan memilih Kaltim sebagai relokasi IKN aspek politis adalah penduduk Wilayah Kaltim mencerminkan ciri identitas

nasional atau mencerminkan struktur masyarakat Indonesia yang plural. Penduduk Kaltim terdiri dari Suku Dayak sebagai penduduk asli, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bugis dan lainnya memiliki berbagai budaya dan adat istiadat. Perbedaan masyarakat yang ada selama ini, dapat hidup berdampingan secara rukun yang dilandasi nilai Pancasila. Faktor inilah yang mendukung relokasi IKN ke Kaltim.

D. Relokasi Ibu Kota Negara Ke Kaltim dan Dampak Ekonomi Politik pada DKI Jakarta

Ilmuwan dan politisi mengemukakan berbagai perkiran dampak ekonomi politik pemindahan IKN pada Jakarta sebagai IKN lama. Pandangan dimaksud terbelah menjadi dua yaitu kalangan yang berpandangan pesimis dan kalangan yang berpandangan optimis. Pandang kalangan pesimis, menganggap pemindahan IKN akan berdampak negatif pada perekonomian DKI Jakarta. Kalangan pandangan positif, menganggap relokasi ibu kota negara tidak akan berpengaruh pada perekonomian DKI Jakarta dengan berbagai argumennya.

Mujiyono, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melalui keterangan tertulis yang disampaikan pada tanggal 19 Januari 2022 menilai, relokasi IKN menuju Kaltim bakal memberi dampak penurunan ekonomi di DKI Jakarta. Mujiyono mengatakan anjloknya ekonomi DKI Jakarta terjadi lantaran belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta konsumsi rumah tangga akan berkurang. Hal tersebut memiliki efek domino pada turunnya ekonomi. Dari sisi pengeluaran ASN, ketika ibu kota pindah ke Kaltim otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga akan berkurang, hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di DKI Jakarta turun dan membuat perekonomian akan turun. Perekonomian DKI Jakarta akan turun karena produksi sejumlah sektor akan berkurang. Misalnya pada sektor jasa, hotel dan katering. Belanja penyelenggara pemerintahan yang terkait sektor jasa, hotel, katering, dan produksi akan terdampak juga mengingat peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan banyak kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan (idxchannel.com).

Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, bahwa pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim, akan berdampak positif pada perekonomian DKI Jakarta. Salah satunya adalah akan meminimalisir terganggunya ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi (jakarta.bisnis.com).

Rizal Taufikurrahman, Kepala Peneliti Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, pemindahan IKN ke Kaltim, secara ekonomi memang masih sulit menggantikan peran DKI Jakarta, meski Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kaltim hanya selisih satu peringkat di bawah DKI Jakarta. Perpindahan IKN nantinya tidak akan menggantikan peran DKI Jakarta sebagai kota bisnis Indonesia. Pasalnya, selama ini pemerintah sudah menyatakan pemindahan ibu kota sebenarnya sebagian besarnya hanya menitikberatkan pada masalah administrasi saja. Kalau pun disiapkan menjadi *sister city* atau provinsi penopang ekonomi DKI, jalan ibu kota baru masih panjang. Ekonomi Kaltim masih bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara kondisinya sangat fluktuatif mengikuti harga pasar internasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini memang tengah menyiapkan Indonesia sebagai penentu harga (*price setter*) kelapa sawit dunia. Namun, mimpi tersebut ditargetkan baru tercapai pada 2045 mendatang (cnnindonesia.com).

Relokasi IKN ke Kaltim tidak akan memiliki dampak negatif pada perekonomian DKI Jakarta. Beberapa argumen yang diajukan pertama, Ibu Kota Nusantara format pemerintahannya aktifitasnya terbatas pada bidang pemerintahan, khususnya pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara. Kedua, relokasi IKN berdampak positif pada DKI Jakarta, karena dapat berkonsentrasi pada aktifitas ekonomi tanpa gangguan aktifitas protes masyarakat. Kondisi selama ini, apabila terjadi aksi protes pada pemerintahan pusat, berakibat terganggunya aktifitas pemerintahan dan aktifitas ekonomi dan aktifitas pemerintahan DKI Jakarta.

Ketiga, pembangunan IKN baru dilakukan secara bertahap sampai tahun 2045. Tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara, ini tidak berpengaruh aktifitas ekonomi DKI Jakarta. UU No.3 /2022, pasal 7 ayat (2) menyatakan “Pelaksanaan

pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merincikan tahapan pemindahan IKN yang diawali dengan pembangunan infrastruktur utama, dan kemudian diikuti pembangunan infrastruktur dasar lalu pengembangan pusat inovasi dan ekonomi. Tidak hanya dalam tahap pembangunan, relokasi pegawai pemerintahan antara kedua kota juga akan dilakukan secara bertahap (setneg.go.id).

Implikasi politik, Jakarta sebagai daerah khusus diperkirakan mengalami penyesuaian. Kota madya yang ada selama ini merupakan salah satu kekhususan Jakarta, harus menyesuaikan dengan struktur pemerintahan kota madya pada provinsi lainnya. Walikota/walikota dan DPRD TK II yang selama ini tidak ada, harus diadakan. Walikota/wakil wali kota dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) dan DPRD Tingkat II dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Reformasi struktur pemerintahan DKI Jakarta yang demikian merupakan konsekwensi relokasi IKN.

Bagaimana implikasi ekonomi pada Kaltim? IKN baru secara khusus akan membawa dampak positif pada wilayah sekitarnya dan Indonesia pada umumnya. Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN. Proyek IKN ini bisa memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah hingga dampak panjang. Dalam jangka pendek, pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya. Kemudian mendorong perdagangan antar wilayah, dan membuka kesempatan penciptaan lapangan kerja. Sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya. Sebab ada peningkatan berbagai aktivitas ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru. Pembangunan IKN juga akan menjadi pionir untuk pengembangan konsep *smart* dan *green city* ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. Langkah adaptasi atas perubahan global yang tengah terjadi terkait kesadaran baru atas

konsep ekonomi hijau. Di sisi lain, pembangunan ibu kota baru juga akan berimplikasi besar pada pemerataan kesejahteraan nasional. Sebab selama ini pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah lainnya cenderung menjadi alternatif atau bahkan terabaikan. "Sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah (liputan6.com).

E. Kesimpulan dan Implikasi

Pertimbangan relokasi adalah lingkungan DKI Jakarta tidak mendukung sebagai IKN modern seperti, kemacetan, kepadatan penduduk, dan potensi bencana alam. Pertimbangan lainnya adalah aspek konstitusi. Undang-Undang yang mengatur IKN sudah tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Aspek politis pertimbangan pemerintah merelokasi IKN adalah struktur pemerintahan dan sistem pemilihan gubernur DKI Jakarta memiliki potensi pada disharmonisasi relasi Presiden dan gubernur.

Aspek politik pertimbangan Pemerintah memilih Kaltim sebagai relokasi IKN. Karena penduduk Kaltim mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Masyarakat Kaltim yang mayoritas dihuni suku Dayak, juga terdapat berbagai suku besar di Indonesia seperti Suku Jawa, Madura, Bugis, Melayu. Kerukunan antar suku yang ada selama ini di Kaltim relatif terpelihara. Aspek ekonomi, pekerjaan masyarakat Kaltim bidang pertanian, perikanan dan perkebunan, pekerjaan ini mendukung sejalan dengan konsep IKN menyesuaikan dengan lingkungan alam.

Relokasi IKN ke Kaltim memiliki pengaruh positif pada DKI aspek ekonomi, karena model Ibu Kota Nusantara terbatas pada aktifitas pemerintahan dan peminadahan IKN dilakukan secara bertahap. Hasil studi berbagai negara yang melakukan relokasi IKN seperti negara Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Pemindahan ibu kota negara Nigeria, yang memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja. tidak banyak mempengaruhi ibu kota yang lama. Beberapa pemikiran dan perkiraan yang diampaikan para ilmuwan dan politisi, relokasi IKN justru akan membawa dampak positif pada IKN lama dan IKN baru. Model Ibu Kota Nusantara

di wilayah Kaltim menganut model kota yang hanya menjalankan aktifitas pemerintahan.

Aspek politik dampak relokasi IKN pada DKI Jakarta adalah mengharuskan DKI Jakarta reformasi struktur pemerintahan, sejajar dengan struktur pemerintahan provinsi lainnya. Walikota/wakil wali kota dan DPRD Kota ketika DKI Jakarta menjadi IKN tidak ada, maka relokasi IKN ke Kaltim, struktur pemerintahan kota tersebut harus disediakan. Pengisian jabatan walikota/wakil walikota dipilih melalui pilkada, pengisian anggota DPRD Kota dipilih melalui pemilu.

Implikasi kebijakan adalah DPR sebagai wakil rakyat hendaknya melaksanakan fungsi pengawasan secara khusus terutama pengawasan penggunaan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut. Pertimbangannya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara dana bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) atau uang rakyat dan jumlahnya cukup besar. Pengawasan khusus DPR ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran atau korupsi

Implikasi akademik, dosen dan mahasiswa dapat berkontribusi proses pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim, melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Misalnya bagaimana persiapan dan pembinaan masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan setelahnya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bagaimana respon pemerintah daerah DKI Jakarta pemindahan IKN? Bagaimana respon pegawai kementerian dan lembaga perpindahan IKN?

Daftar Pustaka

Bartolini, S. (2005) *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union*. New York: Oxford University Press.

Ibino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21.doi:10.1080/10630732.2014.942092.

Jensic, Alicia. (2011). Qualitative VS Quantitative Research, John T. Ishiyama & Marijke Breuning *21st Century Political Science AReference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, pp. 506-514.

Kementrian Prencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*.

Mumford, L. (1991). *The city in history: Its origins, its transformations and its prospects*. London: Penguin.

Quistorff, Brian (2015). Capitalitis? Effects of the 1960 Brazilian Capital Relocation (2015).January 2015, SSRN Electronic Journal, DOI:10.2139/ssrn.2588620

Rossmann, V. (2017) *Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation*. London & New York: Routledge.

Benington, J. and Hartley, J. (2001), Pilots, paradigms and paradoxes: Changes in public sector governance and management in the UK. *International Research Symposium on Public Sector Management* (Barcelona).

Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara Tahun 2022

<https://www.idxchannel.com/economics/ibu-kota-pindah-ke-kaltim-drrd-dki-prediksi-ekonomi-jakarta-menurun>

<https://jakarta.bisnis.com/read/20220127/77/1493897/pemindahan-ibu-kota-negara-ke-kaltim-berdampak-ekonomi-bagi-jakarta>

https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210620183441-92-656969/sulit-gantikan-peran-ekonomi-jakarta-meski-ibu-kota-dipindah>.

https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4864533/sederet-dampak-ekonomi-pembangunan-ibu-kota-baru-nusantara>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/21161811/pemindahan-ibu-kota-negara-gagasan-soekarno-mimpi-soeharto-dan-upaya-jokowi?page=all>.